

STRATEGI *HEDGING* TIONGKOK MERESPON STRATEGI INDO-PASIFIK AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016-2024

Oleh: Rakha Athaya Fitra

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The rivalry between China and the United States has become a fixture of international politics in the 21st century. China's ambition to become a new superpower clashed with the United States' interest in maintaining its status as the hegemon in the Indo-Pacific region. To that end, the United States formulated the Indo-Pacific strategy, with one of the goal is to contain China's influence in the region. In response, China has adopted a hedging strategy in order to respond to the United States strategy.

The research uses qualitative research approach, with data collection techniques using literature study techniques sourced from several journal articles, books, documents, and official websites. This research uses hedging theory to help explain China's behavior when responding to the Indo-Pacific Strategy of the United States.

The results showed that the Chinese government has shown various policies that could be categorized as hedging behavior when responding to the United States' Indo-Pacific Strategy, through strategies such as indirect balancing, economic diversification, and limited bandwagoning. Through hedging, China can adopt a more flexible policies when interacting with the United States.

Keywords: Indo-Pacific, China, United States, Hedging

PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik adalah sebuah wilayah yang telah mendapat banyak perhatian pada abad ke-21 sekarang ini. kawasan yang wilayahnya membentang antara dua samudera dan menjadi rumah bagi lebih dari separuh penduduk dunia ini menjadi bagian dari sebuah pergeseran dalam poros kekuatan dunia yang kemudian menjadikannya sebagai pusat baru dalam interaksi geopolitik dan strategis dalam

hubungan internasional. Semakin banyak negara di dunia yang mengalihkan perhatian mereka ke kawasan ini, bahkan negara-negara yang berasal dari luar Indo-Pasifik, yang kemudian mengerahkan segala aset-aset mereka untuk mengikuti setiap perkembangan dan memastikan kepentingan mereka di kawasan tersebut dapat terpenuhi. Diantara berbagai aktor internasional yang memiliki kepentingan di kawasan ini, mungkin yang paling

signifikan adalah antara negara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Pada abad ke-21, Republik Rakyat Tiongkok telah berubah menjadi sebuah negara yang tidak lagi dapat diabaikan dalam percaturan politik internasional. Melalui reformasi ekonomi yang dimulai oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, negeri ini mengalami transformasi dari sebuah negara yang tertutup dan bersifat autarki menjadi sebuah negara yang sekarang memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Amerika Serikat.¹ Tidak hanya dalam segi ekonomi, kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah kekuatan global juga dapat diamati melalui peningkatan dari partisipasi Tiongkok dalam berbagai urusan internasional, diantaranya seperti bergabungnya Tiongkok ke dalam *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001 dan partisipasi mereka dalam dialog enam kekuatan terkait program nuklir Korea Utara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan Tiongkok dalam politik internasional merupakan salah satu fitur yang mencolok dalam kajian hubungan internasional pada abad ke-21.

Kebangkitan Tiongkok ini merupakan sebuah perkembangan yang diikuti dengan sangat dekat oleh Amerika Serikat. Sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin pada awal dekade 90-an, Amerika Serikat telah muncul sebagai kekuatan adidaya tunggal di permukaan bumi. Amerika Serikat kemudian menggunakan peluang tersebut untuk

menciptakan sebuah sistem internasional baru dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin dari tatanan dunia tersebut. Oleh karena itu, kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan baru memiliki potensi untuk mengguncang *status quo* yang telah dibangun oleh Washington selama beberapa dekade terakhir. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kebangkitan Tiongkok ini dapat dilihat pada sebuah dokumen berjudul *Indo-Pacific Strategy Report* (IPSR) yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2019, yang merupakan laporan tentang kondisi strategis di Indo-Pasifik dan strategi kebijakan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dalam laporan tersebut, Amerika Serikat mengidentifikasi Tiongkok sebagai salah satu dari tantangan yang dihadapi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.²

Tentu saja pemerintah Tiongkok tidak dapat hanya tinggal diam sementara Amerika Serikat berusaha untuk membendung berkembangnya pengaruh Tiongkok, mengingat ambisinya untuk menjadi sebuah *great power*. Dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana pemerintah Tiongkok menggunakan sebuah strategi yang dikenal dengan nama *hedging* sebagai respons atas strategi Indo-Pasifik yang dirumuskan oleh Amerika Serikat. Strategi ini pertama kali muncul dalam bahasan hubungan internasional pada dekade 1990-an sebagai istilah untuk

¹ Statistic Times, "World GDP Ranking 2025," <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php>.

² United States Department of Defense, "Indo-Pacific Strategy Report," June 1, 2019, https://www.andrewerickson.com/wp-content/uploads/2019/11/DoD_Indo-Pacific-Strategy-Report_2019.pdf. Hal. 7-10

menjelaskan bagaimana sebuah negara mengambil posisi yang menengah antara *balancing* dan *bandwagoning*.

KERANGKA TEORI

Tingkat Analisa: Sistem

Penelitian ini menggunakan level analisis sistem, yang menganalisis bagaimana bentuk dari sebuah sistem internasional dan distribusi dari kekuatan memberikan pengaruh terhadap bagaimana sebuah negara bertindak dengan negara lain.³ Karena perilaku sebuah negara sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada, sehingga dengan memahami bagaimana sistem internasional berfungsi, maka pengaruhnya terhadap bagaimana sebuah negara bertindak dapat diketahui.

Teori Perilaku Hedging

Penelitian ini menggunakan teori *hedging* untuk menjelaskan respons pemerintah Tiongkok terhadap strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat. Menurut Kuik Cheng-Chwee, *hedging* didefinisikan sebagai perilaku di mana negara mengurangi risiko dengan mengejar lebih dari satu kebijakan untuk menciptakan efek saling menangkal dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan taruhan tinggi.⁴ Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko yang didapat oleh negara ketika dihadapkan dengan situasi yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Melalui

strategi *hedging*, sebuah negara dapat memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merespons terhadap perkembangan di luar negaranya. Dalam hal ini, perilaku *hedging* dapat dilihat sebagai jalan tengah yang menjadi alternatif dari tindakan *balancing* atau *bandwagoning* secara penuh.

Perilaku *hedging* oleh suatu negara sangat beragam dan tergantung terhadap kenyataan lapangan yang dihadapi sebuah negara. Kuik membagi perilaku *hedging* negara menjadi dua arah, yaitu ke arah penolakan kekuatan (*power rejection*) yang lebih mengarah ke tindakan *balancing*, dan penerimaan kekuatan (*power acceptance*) yang lebih mengarah ke tindakan *bandwagoning*.⁵

1. **Indirect Balancing** adalah kebijakan di mana sebuah negara berupaya untuk mengurangi risiko keamanan melalui peningkatan terhadap kapabilitas militer atau menjalin kerja sama militer dengan negara lain tanpa secara eksplisit menargetkan kebijakan tersebut terhadap satu negara tertentu.
2. **Dominance Denial**, di mana sebuah negara berusaha untuk mengurangi dan membendung risiko yang didapat dengan menantang negara hegemoni dengan cara mengejar jalur-jalur non-militer agar terciptanya sebuah keseimbangan dan mencegah negara hegemoni tersebut dalam mencapai dominasi yang berlebihan.
3. **Economic Diversification**, di mana sebuah negara berusaha untuk memperluas jaringan

³ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (2013): hal. 898.

⁴ Kuik Cheng-Chwee, "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China," *Contemporary Southeast Asia* 30, no. 2 (2008): hal. 163.

⁵ Ibid., hal. 167-171

perdagangan dan investasinya dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber/kekuatan lain, sehingga apabila terjadi kerenggangan hubungan antara negara dengan hegemoni, risiko gangguan terhadap perekonomian negara dapat dikurangi.

4. ***Economic Pragmatism***, di mana sebuah negara menjalin kerja sama ekonomi dengan sebuah negara hegemoni demi memaksimalkan keuntungan ekonomi yang dapat diterima dari kerja sama tersebut, walaupun kedua negara yang bersangkutan mungkin memiliki perbedaan dalam hal seperti ideologi atau sistem politik.
5. ***Binding Engagement***, di mana sebuah negara melibatkan dan mengikat negara hegemoni ke dalam berbagai institusi dan perjanjian internasional untuk menciptakan sebuah tempat berkomunikasi dan mendorong pemeliharaan *status-quo*, sehingga melalui institusi tersebut, sebuah negara dapat memaksa negara lain untuk menggunakan aturan bermain yang sama.
6. ***Limited Bandwagoning***, di mana sebuah negara menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara hegemonik dalam isu-isu tertentu **tanpa** sepenuhnya tunduk kepada kekuatan yang bersangkutan. Melalui *limited bandwagoning*, sebuah negara berharap bisa mendapatkan keuntungan dari bekerja sama dengan negara hegemoni, tetapi masih menjaga kemerdekaannya dan hubungan yang baik dengan negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat intuitif dan terstruktur agar dapat membantu seorang peneliti dalam menghasilkan sebuah pemahaman dengan cara yang efisien dan jelas. Tujuannya adalah untuk menambah pemahaman seseorang tentang berbagai fenomena, aktivitas, dan proses sosial yang ada di dunia.⁶ Sedangkan studi pustaka adalah metode pengumpulan data di mana seorang peneliti menelusuri berbagai sumber-sumber tulisan yang telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber tulisan ini dapat berbentuk buku, jurnal akademik oleh peneliti lain, laporan lapangan, traktat internasional, hasil wawancara, sampai dokumen-dokumen negara seperti undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan di Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan yang luas dan penting seperti Indo-Pasifik tentu saja memiliki berbagai tantangan yang dapat ditemukan di dalamnya. Persaingan yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat; dua negara terbesar dan berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik, telah menjadi sebuah variabel yang tidak terelakkan ketika ingin membahas tentang dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, di kawasan ini juga menjadi lokasi dari beberapa sengketa wilayah antara beberapa negara, di mana kasus yang paling terkenal adalah sengketa wilayah

⁶ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 62

Laut Tiongkok Selatan yang diklaim oleh Tiongkok dan negara tetangganya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Kemudian, ada juga masalah terkait status Pulau Taiwan yang hingga sekarang masih diklaim oleh pemerintah Tiongkok di Beijing sebagai bagian dari wilayahnya, dan bagaimana reunifikasi menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan politik luar negeri Tiongkok.

Tidak hanya masalah keamanan tradisional, isu seperti perubahan iklim juga terus menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut; dengan naiknya level permukaan air, meningkatnya intensitas cuaca ekstrem seperti angin topan dan badai, serta musim kemarau yang berkepanjangan menjadi beberapa contoh permasalahan yang muncul dari isu perubahan iklim,⁷ yang kemudian menghasilkan dampak buruk terutama kepada negara-negara kecil di Samudera Pasifik.

Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat

Sebelumnya, kebijakan Amerika di Indo-Pasifik dihambat oleh kesulitan bagi pemerintahan Amerika sendiri dalam mendefinisikan sebuah strategi yang jelas.⁸ Kebijakan *Pivot to Asia* Presiden Barack Obama, misalnya, walaupun bertujuan untuk menggeser perhatian Amerika dari Eropa dan Timur Tengah ke arah Asia dan

sudah mencakup berbagai tindakan yang signifikan, tidak diikuti dengan visi yang jelas tentang apa tantangan atau peluang apa yang dihadapi Amerika Serikat di kawasan ini, ataupun strategi apa yang mendasarinya.⁹

Berdasarkan dokumen yang dirilis oleh Gedung Putih Amerika Serikat pada Februari tahun 2022, Strategi Amerika Serikat Indo-Pasifik berputar pada keperluan untuk menciptakan sebuah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,¹⁰ yang berarti menciptakan sebuah kawasan di mana negara-negara dapat membuat keputusan untuk mereka sendiri secara bebas tanpa adanya paksaan dari negara lain, melalui pembangunan ketahanan untuk negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, dengan mendukung pembangunan yang berdasarkan prinsip dan institusi demokrasi, jaminan kebebasan terhadap media dan berpendapat, menjunjung penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan tatanan dunia yang adil berdasarkan hukum-hukum internasional. Di saat yang sama, Amerika Serikat beserta mitra strategisnya juga menjaga agar kawasan Indo-Pasifik tetap terbuka kepada semua pihak dan diatur sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Dalam memenuhi tujuan tersebut, Amerika Serikat mengidentifikasi Tiongkok sebagai salah satu tantangan terbesar terhadap kepentingan mereka di kawasan Indo-Pasifik. Di dalam laporan *National Security Strategy* yang dirilis pada Desember tahun

⁷ Mely Caballero-Anthony and Alistair D. B. Cook, "Understanding Climate Security in the Indo-Pacific," *Third World Quarterly* 45, no. 14 (2024): 2039–46, <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2428813>.

⁸ Roger Cliff, "A New U.S. Strategy for the Indo-Pacific," The National Bureau of Asian Research, June 2020.

⁹ Ibid.

¹⁰ United States White House, "U.S. Indo-Pacific Strategy," February 2022. Hal. 8

2017,¹¹ misalnya, Amerika Serikat bahkan menggambarkan persaingan dengan Tiongkok sebagai sebuah persaingan antara tatanan dunia yang bebas dengan yang represif.

Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Memperkuat aliansi dan kemitraan strategis.** Ini dilakukan diantaranya dengan menghidupkan kembali kerja sama Quad pada tahun 2017 yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Selain itu, juga memperdalam kerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, serta mendukung organisasi regional seperti ASEAN.
2. **Meningkatkan kesiapan militer.** Sesuai dengan statusnya sebagai negara adidaya, Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia, terutama angkatan lautnya di mana Amerika merupakan satu dari dua negara yang mampu mengoperasikan kapal induk bertenaga nuklir. Kekuatan ini kemudian didukung dengan keberadaan berbagai pangkalan militer yang tersebar di kawasan Indo-Pasifik, termasuk di wilayah negara sekutunya seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Ini artinya Amerika Serikat mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan mereka ke semua potensi titik panas dan merespons dengan cepat terhadap krisis tersebut.

¹¹ United States White House, "National Security Strategy of the United States," December 2017. Hal. 45-46

3. **Membangun ketahanan regional.** Amerika Serikat berkomitmen untuk membantu dalam mempersiapkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik agar dapat dengan lebih baik dalam menangani berbagai tantangan transnasional baru yang muncul pada abad ke-21, seperti efek dari perubahan iklim, potensi pandemik di masa depan, dan membantu dalam transisi kepada energi terbarukan. Dalam hal tersebut, Amerika Serikat telah melakukan beberapa hal,¹² seperti meluncurkan kelompok *Partners in the Blue Pacific* (PBP) yang bertujuan untuk hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Strategi *hedging* Tiongkok

Menurut Xiaodi Ye, ada tiga faktor yang kemudian mendorong pemerintah Tiongkok untuk melakukan tindakan *hedging* terhadap Amerika Serikat.¹³ Pertama adalah munculnya sistem unipolar Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal setelah runtuhnya Uni Soviet pasca Perang Dingin, yang kemudian dimanfaatkan oleh Washington untuk menciptakan sebuah sistem internasional baru dengan Amerika Serikat sebagai

¹² United States Department of State, "The United States' Enduring Commitment to the Indo-Pacific: Marking Two Years Since the Release of the Administration's Indo-Pacific Strategy," February 9, 2024, <https://2021-2025.state.gov/the-united-states-enduring-commitment-to-the-indo-pacific-marking-two-years-since-the-release-of-the-administrations-indo-pacific-strategy/>.

¹³ Xiaodi Ye, "Explaining China's Hedging to the United States' Indo-Pacific Strategy," *The China Review* 20, no. 3 (2020): Hal. 214.

pusatnya. Kedua, kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah *rising power* telah menjadikannya sebagai fokus utama dalam pertimbangan politik Amerika Serikat, yang memandang kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman terhadap hegemoninya dan memunculkan keinginan untuk membendung pertumbuhan pengaruhnya. Ketiga, kondisi geografis Tiongkok yang dikelilingi oleh negara-negara lain seperti Rusia, India, Jepang, atau Korea Selatan berarti pemerintah Tiongkok harus lebih hati-hati terkait reaksi tetangganya terhadap kebijakan yang mereka ambil untuk mencegah terciptanya persepsi ancaman yang kemudian dapat mendorong negara-negara tersebut untuk melakukan *balancing* melalui penciptaan sebuah aliansi anti-Tiongkok.

Ketika merespons terhadap strategi Amerika Serikat di Indo-Pasifik, pemerintah Tiongkok telah menunjukkan beberapa perilaku *hedging* dalam kebijakannya.

Indirect Balancing Tiongkok

Dalam merespons peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik, pemerintah Tiongkok menjalankan program besar-besaran untuk memodernisasi angkatan bersenjata mereka. Ini diantaranya dilakukan melalui penyederhanaan struktur komando militer, seperti wilayah komando yang awalnya ada tujuh wilayah kemudian disederhanakan menjadi lima; barat, timur, tengah, utara, dan selatan.

Pemerintah Tiongkok juga melakukan modernisasi terhadap perlengkapan alutsistanya, di mana yang paling menonjol dapat dilihat

pada *People Liberation Army Navy* (PLAN), yang merupakan cabang angkatan laut militer Tiongkok. Diantara tahun 2017 dan 2019, Tiongkok sudah meluncurkan kapal-kapal perang baru dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah kapal yang dibangun oleh angkatan laut Jepang, India, Perancis, dan Inggris digabungkan pada saat yang sama.¹⁴ Kemudian pada tahun 2022, Tiongkok meluncurkan *Fujian*, yang merupakan kapal induk ketiga milik Tiongkok dan kapal induk pertama yang sepenuhnya didesain dan dibangun secara domestik, dan menerapkan beberapa teknologi modern dibandingkan desain kapal induk sebelumnya sehingga lebih dekat dalam kapabilitas dengan desain yang dimiliki Amerika Serikat.

Selain melakukan peningkatan terhadap kapabilitas militernya, Pemerintah Tiongkok juga berusaha untuk menjalin kerja sama dalam bidang militer dan keamanan dengan negara lain. Sebagai contoh, Pada 20 Oktober 2019, Menteri Pertahanan Singapura Dr Ng Eng Hen bersama dengan Penasihat Negara serta Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok Jenderal Wei Fenghe menandatangani kerja sama peningkatan ADESC. Perjanjian ini merupakan penyempurnaan dari ADESC yang pertama kali ditandatangani pada 7 Januari 2008 oleh kedua negara tersebut. ADESC dari awal pembentukannya ditujukan untuk memformalkan kerja sama dalam bidang pertahanan yang

¹⁴ Harry Du, "How Is China Modernizing Its Navy?," ChinaPower Project, accessed September 23, 2025, <https://chinapower.csis.org/china-naval-modernization/>.

berlangsung antara Tiongkok dan Singapura serta memberikan sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan lebih lanjut kemitraan antara keduanya dalam masalah pertahanan.¹⁵

Hal ini sesuai dengan perilaku *hedging* yang disebut dengan *indirect balancing*, di mana sebuah negara berusaha untuk mengurangi risiko ancaman terhadap negaranya dengan cara menjalin kerja sama militer dengan kekuatan lain dan melakukan peningkatan terhadap kemampuan militer mereka, **tanpa** secara eksplisit menargetkan upaya tersebut terhadap satu negara tertentu.

Limited Bandwagoning Tiongkok

Ketika melakukan *hedging*, sebuah negara dapat secara selektif melakukan kerja sama dengan sebuah negara hegemoni terkait isu-isu tertentu dengan tujuan untuk menjalin hubungan tanpa secara penuh mengorbankan kedaulatan atau kemerdekaannya kepada negara hegemoni tersebut, yang disebut juga dengan istilah *limited bandwagoning*. Melalui *limited bandwagoning*, suatu negara masih bisa mendapatkan keuntungan dari melakukan kerja sama dengan sebuah negara hegemonik, tapi di saat yang sama menjaga kemerdekaannya. Dalam konteks penelitian ini, salah satu area di mana Tiongkok telah melakukan *limited bandwagoning* dengan Amerika Serikat adalah melalui kerja sama di masalah perubahan iklim.

Jika dilihat dari segi sejarahnya, Amerika Serikat dan Tiongkok telah memiliki sejarah yang panjang dalam melakukan kerja sama untuk melawan perubahan iklim, yang membentang sepanjang 30 tahun terakhir,¹⁶ bahkan di saat kedua negara memiliki ketegangan dalam berbagai bidang lain.

Pada beberapa tahun terakhir, kooperasi antara Beijing dan Washington dalam perubahan iklim telah diwujudkan dalam bentuk berbagai forum dan kesepakatan yang bersifat bilateral maupun internasional. Pada November 2021, Tiongkok dan Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi bersama Glasgow tentang peningkatan aksi iklim di tahun 2020-an. Deklarasi yang dikeluarkan bersamaan dengan konferensi COP26 ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen kedua negara tersebut dalam melawan perubahan iklim, serta niat mereka untuk meningkatkan kerja sama dalam beberapa hal, seperti membuat kerangka aturan terkait pengurangan emisi gas kaca, memaksimalkan manfaat dari transisi ke energi terbarukan untuk masyarakat, dan lainnya.

Melalui deklarasi tersebut, Amerika Serikat dan Tiongkok berniat untuk membentuk sebuah forum yang disebut dengan nama Kelompok Kerja untuk Meningkatkan Aksi terhadap Iklim tahun 2020-an, yang tujuannya

¹⁵ Ministry of Defence of Singapore, "Fact Sheet: Enhanced Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation (ADESC)," Ministry of Defence, accessed September 24, 2025, https://www.mindef.gov.sg/news-and-events/latest-releases/20oct19_fs/.

¹⁶ Betty Wang and Taylah Bland, "Four Lessons from 30 Years of US-China Climate Cooperation," Dialogue Earth, accessed September 24, 2025, <https://dialogue.earth/en/climate/four-lessons-from-30-years-of-us-china-climate-cooperation/>.

adalah untuk bertemu secara rutin untuk membahas tentang krisis iklim dan bagaimana mereka dapat meningkatkan aksi yang lebih konkret untuk menangani masalah tersebut dalam dekade 2020. Kelompok kerja ini kemudian mulai dioperasionalkan pada tanggal 12 Januari 2024 oleh kedua negara melalui konferensi video online.

Kerja sama antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam perubahan iklim ini tentu saja tidak tanpa masalahnya sendiri. Berbagai ketegangan dalam isu lain sering kali menjadi hambatan dalam kerja sama kedua negara. Sebagai contoh, pada tanggal 22 Agustus 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi melakukan kunjungan ke Pulau Taiwan, sebuah wilayah yang masih diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari Tiongkok.¹⁷ Akibatnya, Tiongkok membatalkan pertemuan dari kelompok kerja dengan Amerika Serikat yang awalnya akan membahas tentang kerja sama dalam mengurangi efek perubahan iklim.

Ketersediaan Tiongkok dalam melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim, adalah contoh dari bagaimana Beijing telah melakukan kegiatan *hedging* melalui *limited bandwagoning*, walaupun dalam beberapa isu pemerintah Tiongkok tetap dengan tegas mempertahankan posisinya terhadap Amerika Serikat (seperti masalah terkait status Pulau Taiwan), di sisi lain Tiongkok telah

menunjukkan ketersediaan untuk melakukan kooperasi dengan Amerika Serikat dalam isu di mana terdapat persamaan dalam kepentingan antara keduanya.

KESIMPULAN

Kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah kekuatan baru dalam politik internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik, adalah sesuatu yang telah menjadi perhatian bagi pemerintah Amerika Serikat. Sebagai sebuah negara adidaya, Amerika Serikat mempunyai kepentingan dalam menjaga agar statusnya tidak tergantikan, dan kebangkitan Tiongkok memiliki potensi untuk mengubah *status quo* tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat berusaha untuk mengimbangi pertumbuhan Tiongkok. Hal ini terutama sangat penting di kawasan Indo-Pasifik, yang nilai strategisnya dalam politik internasional hanya akan terus meningkat pada abad ke-21 dan menjadi arena utama dari persaingan antara kedua negara tersebut.

Untuk membantu dalam tujuan tersebut, Amerika Serikat merumuskan yang namanya *Indo-Pacific Strategy*. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan aktif, dan secara tidak langsung membendung pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Sebagai respons terhadap strategi tersebut, Tiongkok mengadopsi perilaku *hedging* daripada mengambil posisi *balancing* atau *bandwagoning* secara penuh.

Hedging merupakan sebuah strategi di mana suatu negara berusaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dengan cara mengejar lebih dari satu kebijakan untuk menciptakan efek

¹⁷ Joe Lo, "US-China Climate Working Group Cancelled after Pelosi's Taiwan Visit," accessed September 24, 2025, <https://www.climatechangenews.com/2022/08/08/us-china-climate-working-group-cancelled-after-pelosis-taiwan-visit/>.

saling menangkal. Melalui perilaku *hedging*, negara dapat dengan fleksibel dalam menghadapi isu-isu di luar perbatasannya, memaksimalkan keuntungan ketika hubungan sedang baik, dan mengurangi potensi kerugian pada situasi yang buruk.

Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah menunjukkan beberapa perilaku yang dapat dikategorikan sebagai strategi *hedging* dalam berbagai kebijakannya untuk merespons terhadap strategi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Pertama, dengan *indirect balancing*, Tiongkok melakukan *hedging* melalui kebijakannya dalam meningkatkan kemampuan militernya, diantaranya kepada angkatan lautnya yang mendapat ekspansi besar-besaran, dan dalam menjalin kerja sama dalam bidang keamanan dan militer dengan negara seperti Singapura melalui ADESC. Kedua, Tiongkok melakukan *limited bandwagoning* dengan Amerika Serikat melalui kerja samanya dalam isu mengatasi efek dari perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Caballero-Anthony, Mely, and Alistair D. B. Cook. "Understanding Climate Security in the Indo-Pacific." *Third World Quarterly* 45, no. 14 (2024): 2039–46. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2428813>.
- Cheng-Chwee, Kuik. "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China." *Contemporary Southeast Asia* 30, no. 2 (2008): 159–85.
- Cliff, Roger. "A New U.S. Strategy for the Indo-Pacific." The National Bureau of Asian Research, June 2020.
- Du, Harry. "How Is China Modernizing Its Navy?" ChinaPower Project. Accessed September 23, 2025. <https://chinapower.csis.org/china-naval-modernization/>.
- Lo, Joe. "US-China Climate Working Group Cancelled after Pelosi's Taiwan Visit." Accessed September 24, 2025. <https://www.climatechangenews.com/2022/08/08/us-china-climate-working-group-cancelled-after-pelosis-taiwan-visit/>.
- Ministry of Defence of Singapore. "Fact Sheet: Enhanced Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation (ADESC)." Ministry of Defence. Accessed September 24, 2025. https://www.mindef.gov.sg/news-and-events/latest-releases/20oct19_fs/.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (2013): 898.
- Statistic Times. "World GDP Ranking 2025." <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php>.
- United States Department of Defense. "Indo-Pacific Strategy Report." June 1,

2019.
https://www.andrewerickson.com/wp-content/uploads/2019/11/DoD_Indo-Pacific-Strategy-Report_2019.pdf.
- United States Department of State. "The United States' Enduring Commitment to the Indo-Pacific: Marking Two Years Since the Release of the Administration's Indo-Pacific Strategy." February 9, 2024. <https://2021-2025.state.gov/the-united-states-enduring-commitment-to-the-indo-pacific-marking-two-years-since-the-release-of-the-administrations-indo-pacific-strategy/>.
- Wang, Betty, and Taylah Bland. "Four Lessons from 30 Years of US-China Climate Cooperation." Dialogue Earth. Accessed September 24, 2025. <https://dialogue.earth/en/climate/four-lessons-from-30-years-of-us-china-climate-cooperation/>.
- Ye, Xiaodi. "Explaining China's Hedging to the United States' Indo-Pacific Strategy." *The China Review* 20, no. 3 (2020): 214.